

BAB IV HASIL PENELITIAN

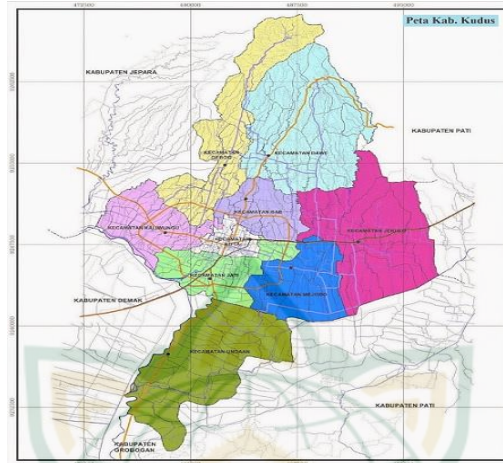
A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sekilas Tentang Kabupaten Kudus

Jika melihat atau membandingkan tampilan Kota Kudus saat ini dengan dahulu, Kota Kudus relatif tertinggal dibandingkan dengan kota-kota kecil dan menengah lainnya di Indonesia. Kota Kudus mengalami perubahan dengan bangunan bertingkat dan bangunan yang berhubungan dengan karakteristik kota metropolitan. Gaya hidup dan kebiasaan konsumsi juga telah berubah. Dulu warga Pekonbaru hanya berbelanja di pasar tradisional, kini mereka bisa membeli kebutuhan sehari-hari di supermarket tradisional, karena banyak supermarket atau minimarket, restoran cepat saji dan pusat perbelanjaan bermunculan di sekitar atau di Kota Kudus. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan nasional setiap tahunnya yang terus meningkat meskipun harga-harga pangan dan barang lainnya meningkat.

Sehingga perkembangan kota yang sangat padat seperti ini menyebabkan orang pindah dari kota nya untuk mencari pekerjaan di kota Kudus. Selain kemajuan kota Kudus yang menjadi daya tarik bagi orang luar, Kudus juga memiliki makam Wali Songo dua yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Ini jelas menjadi kesempatan bagi orang yang mencari pekerjaan di daerah tersebut. Beberapa ada yang mencoba mencari uang untuk kebutuhannya sendiri dengan berbagai cara, seperti mengemis di jalan dan di tempat umum. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Kudus karena pendapatan mereka lebih tinggi dari pekerjaan lain. Semakin banyak gelandangan dan pengemis di seluruh kota, mengganggu pemerintah dan masyarakat. Dengan itu, pemerintah membuat metode atau strategi untuk menangani gelandangan dan pengemis. Namun sejauh ini, gelandangan dan pengemis belum ditangani secara efektif.

Gambar 4.1
Letak dan Luas Kota Kudus



Sumber: <https://peta-hd.com/peta-kabupaten-kudus-lengkap-gambar-dan-keterangannya/>

Kudus adalah salah satu provinsi di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus dikenal dengan sebutan Kota Kretek karena banyaknya industri pembuatan tembakau yang ada di kota tersebut. Kabupaten Kudus meliputi wilayah seluas 42.516 hektar atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ketinggian rata-rata Kabupaten Kudus adalah 55 m di atas permukaan laut. Kabupaten Kudus beriklim tropis dengan suhu sedang dan curah hujan relatif sedikit. Kabupaten Kudus terletak antara 1100 36' dan 1100 50' BT dan antara 60 51' dan 70 16' LS. Jarak terjauh adalah 16 km dari barat ke timur dan 22 km dari utara ke selatan. Secara administratif, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan dan 123 desa. Kesembilan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Wilayah terluas Kecamatan Dawe seluas 8.584 hektar (20,19%) dan terkecil Kecamatan Kota seluas 1.047 hektar (2,46%) wilayah Kabupaten Kudus. Pembagian wilayah Kabupaten Kudus adalah:

- a. Berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati di sebelah utara.
- b. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

- c. Berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati di sebelah selatan.
- d. Berbatasan dengan Kabupaten Pati di sebelah timur.

Menurut data statistik Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan, serta 707 RW, 3.698 RT dan 4.343 desa. Secara umum Kudu meliputi area seluas 42.516 hektar atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Terluas adalah Desa Dawe dengan luas 8.584ha (20,19%) dan terkecil adalah Desa Kota dengan luas 1.047ha (2,46%) dari total luas Kabupaten Kudus. Luas totalnya adalah 20.687 ha (48,66%) lahan garapan bebas padi, 7.563 ha (17,79%) lahan garapan bebas padi, dan sisanya 14.266 ha (33,55%) merupakan lahan tidur.¹

Tabel 4.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus

Tabel 1.1.1		Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus, 2019			
		<i>Total Area and Number of Islands by Subdistrict in Kudus Regency, 2019</i>			
<i>Kecamatan Sub District</i>		<i>Ibukota Kecamatan</i>	<i>Luas Area</i>	<i>Persentase Terhadap Luas Wilayah</i>	<i>Jumlah Pulau</i>
		<i>Capital of Subdistrict</i>	<i>(km²/sq.km)</i>	<i>Percentage to Area</i>	<i>Number of Islands</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kaliwungu	Kedungdowo	32.713	7.69	-
2	Kota	Purwosari	10.473	2.46	-
3	Jati	Tanjungkarang	26.298	6.19	-
4	Undaan	Undaan Kidul	71.770	16.88	-
5	Mejobo	Jepang	36.766	8.65	-
6	Jekulo	Jekulo	82.917	19.50	-
7	Bae	Bae	23.323	5.49	-

¹ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus” diakses pada 7 Juli, 2023. <https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2018/01/26/5/luas-wilayah-kabupaten-kudus-menurut-kecamatan.html>

8	Gebog	Gondosari	55.060	12.95	-
9	Dawe	Pij	85.837	20.19	-
Ku dus		0.000	425.157	100.00	-
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus Source: <i>BPS-Statistics of Kudus Regency</i>					

2. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus (Dinas Sosial P3AP2KB Kudus)

Pada tahun 1974 DINSOS P3AP2KB adalah perkumpulan KB. Sekitar tahun 1979, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk di seluruh provinsi dan provinsi. Sejak saat itu, BKKBN Kudus berganti nama menjadi Kantor Keluarga Berencana setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah diberlakukan, tidak lagi terpusat, tetapi langsung berpusat di Kabupaten Kudus. Ketentuan lainnya, Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Kudus telah berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMKB). Pada tahun 2017, BPMKB kembali dibubarkan dan berganti nama menjadi P3AP2KB bakti sosial. 2018-2023 Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kudus yaitu terwujudnya Kabupaten Kudus yang semakin sejahtera. Jadi kita membutuhkan lembaga untuk mengatur program untuk kesejahteraan komunitas kita. Salah satunya menyangkut masalah sosial - perlindungan anak. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.²

Perlindungan anak hanya dapat dicapai melalui keterlibatan banyak pihak karena anak tidak mampu memenuhi hak-haknya. Pemerintah dengan kekuatan konstitusional dan orang tua dengan kekuatan pencipta. Peran pemerintah dalam bidang sosial adalah membantu masyarakat menjalankan fungsi sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan hidup yang dihadapinya. Ini mempromosikan

² “Profil Dinas Sosial,” diakses pada 15 Februari, 2023, <https://dinsos.kuduskab.go.id/>

perubahan sosial, memecahkan masalah dalam hubungan manusia, mempromosikan keadilan sosial, dan melindungi kepentingan terbaik anak-anak. Maka dibentuklah pranata sosial yang salah satunya adalah bakti sosial pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. P3AP2KB DINSOS beralamat di Kode Pos 59319 Kabupaten Kudus Jalan Mejobo Nomor 99.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AP2KB



Tugas masing-masing posisi meliputi:

- a. Kepala Departemen
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Rincian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum dan Personalia
- c. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
 - 1) Dinas Rehabilitasi Sosial
 - 2) Divisi Dukungan Jaminan dan Keselamatan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin terdiri dari:
 - 1) Peningkatan Kapasitas Departemen Sosial dan Kelembagaan
 - 2) Divisi Peningkatan Kapasitas Keluarga Miskin
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - 1) Departemen Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Divisi Perlindungan Anak

- f. Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - 1) Bidang Promosi Pengendalian Penduduk dan Mobilisasi Informasi
 - 2) Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - 3) Departemen Kesejahteraan Keluarga dan Kompensasi Keluarga
- g. Kelompok Fungsional
- h. Unit Implementasi Teknologi Layanan
- 3. Ringkasan dan Fungsi
 - a. Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, panti sosial dan pemberdayaan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan perumusan kebijakan daerah di bidang KB.
 - b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan kelembagaan
 - c. kesejahteraan sosial dan rumah tangga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - d. Koordinasi kebijakan daerah di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, dukungan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan panti sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.
 - e. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan bantuan jaminan sosial, pemberdayaan panti sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.
 - f. Pengendalian dan pelaporan di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, dukungan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan panti sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.
 - g. Administrasi pelayanan di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan bantuan jaminan sosial, pemberdayaan panti sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.

- h. Penyelenggara fungsi sekretaris dinas.
 - i. Kontrol konfigurator pekerjaan unit implementasi teknologi layanan.
 - j. Melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Visi Dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus
- Visi : Kudus menjadi bupati yang modern, religius, intelektual dan sejahtera.
- Misi : Memanfaatkan teknologi dan multimedia untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang berkelas, kreatif dan inovatif
- Tujuan : 1. Meningkatkan kontrol populasi
2. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- Sasaran : 1. meningkatkan kontrol populasi
2. meningkatkan keluarga berencana
3. meningkatkan kesejahteraan sosial
4. Peningkatan PMKS
5. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
6. Tanggung Jawab Kinerja yang Ditingkatkan

B. Deskripsi data Penelitian

a. Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Program Keluarga Harapan dalam Mengurangi Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Kudus

Program Keluarga Harapan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI No. 11. 01/HUK/2018 “Tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 dan Keputusan Bupati 29 Januari 2018 tentang Tim Pelaksana PKH 2018 dan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Teknis PKH berfokus pada sistem penargetan yang berdasarkan atas data database yang telah disediakan BPS. Data database ini adalah PPLS18 (Program Perlindungan Sosial) yang telah diputuskan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) semua program bantuan sosial berbasis keluarga harus didasarkan pada

hasil integrasi data, dengan menggunakan standar *operasional procedure* oleh para unit Pelaksanaan PKH yaitu :³

- a. Perencanaan
- b. Penetapan calon peserta PKH
- c. Persiapan lokal
- d. Fase validasi/pertemuan awal
- e. Penetapan Keluarga Penerima PKH
- f. Menyebarkan dukungan PKH kepada masyarakat
- g. Irian
- h. Mengadakan pertemuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga mengkonfirmasi perjanjian
- i. Pemutakhiran data
- j. Transformasi kepesertaan
- k. Pengaduan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kudus dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs untuk BAPPEDA Kota Kudus. Implementasi selanjutnya dilakukan oleh OPD sebagai pelaksana teknologi industri dan pihak swasta sebagai mitra implementasi. Perencanaan tersebut kemudian dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs BAPPEDA Kota Kudus untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Kudus. Implementasi selanjutnya dilakukan oleh OPD sebagai pelaksana teknologi industri dan pihak swasta sebagai mitra implementasi. Belakangan, Bappeda Kota Kudus mulai memantau dan mengevaluasi perkembangan yang dilakukan. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs merupakan rencana aksi daerah lima tahunan yang mengimplementasikan berbagai aksi untuk mendukung pencapaian SDGs, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Visi dan misi pembangunan Kota Kudus yang tertuang dalam RPJMD telah diterjemahkan ke dalam dokumen SDGs RAD yang memuat rangkaian kegiatan pembangunan lima tahunan yang dapat mendukung pencapaian tujuan SDGs internasional. Sertakan pemetaan peran pemangku kepentingan saat merumuskan strategi, program, kegiatan, indikator terukur, dan sumber pendanaan. Penyusunan RAD SDG dilakukan oleh BAPPEDA Kota Kudus dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). Stakeholder Kota Kudus yaitu Organisasi

³ Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, 37-50

Perangkat Daerah (OPD) Kota Kudus, LSM, BUMN, LSM dan stakeholder lainnya ikut serta dalam proses persiapan untuk mendukung pembangunan Sustainable Development Goals Kota Kudus. Penyusunan dokumen SDGs RAD Kota Kudus juga mengundang perwakilan dunia usaha dan swasta Kota Kudus yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals melalui Corporate Social Responsibility (CSR), untuk berpartisipasi dalam kesepakatan ini. Bappeda Kota Kudus melakukan monitoring dan evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan (Bappeda Kota Kudus, 2020). Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs merupakan rencana aksi daerah lima tahunan yang mengimplementasikan serangkaian tindakan untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Visi dan misi pembangunan Kota Kudus yang tertuang dalam RPJMD telah diterjemahkan ke dalam dokumen SDGs RAD yang memuat rangkaian kegiatan pembangunan lima tahunan yang dapat mendukung pencapaian tujuan SDGs internasional. Merencanakan peran pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi, program, kegiatan, indikator terukur, dan sumber pendanaan. Penyusunan RAD SDGs dilakukan oleh BAPPEDA Kota Kudus dengan menggunakan *metode Focus Group Discussion (FGD)*. Pemangku kepentingan Kota Kudus yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kudus, LSM, BUMN, LSM dan pemangku kepentingan lainnya ikut serta dalam proses persiapan untuk mendukung pengembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Kudus. Dokumen SDGs RAD Kota Kudus juga mengundang perwakilan dari dunia usaha/swasta Kota Kudus, yang diharapkan mampu mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), namun minim pengetahuan swasta Kota Kudus. Kurangnya pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan telah mencegah sektor swasta untuk berpartisipasi dalam perjanjian ini.

Berdasarkan dokumen RAD SDGs Kota Kudus, pencapaian SDGs pertama di Kota Kudus dicapai melalui pelaksanaan PKH. Pemkot Kudus berencana menyalurkan sembako PKH pada tahun 2019 sekitar 45.000 KPM. Program Perhetoivo dilaksanakan oleh Petugas Program Bakti Sosial Kota Kudus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

Deskripsi pelaksanaan PKH Dinas Sosial Kabupaten Kudus, dan hasil wawancara penulis dengan kepala dinas kesejahteraan sosial Kabupaten Kudus tentang proses pelaksanaan PKH Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

“PKH merupakan program dari pusat yang bertujuan untuk mengubah pola pikir penerima manfaat tentang keterbelakangan ekonomi. Pelaksanaan PKH di rumah merupakan kesempatan bagi anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa tambahan biaya alat tulis, seragam sekolah, dll. Difokuskan pada bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan, khususnya, agar ibu hamil dan bayi tetap mendapatkan gizi yang baik dan imunisasi selama masa tumbuh kembangnya. memenuhi syarat PKH, kemudian Dinas Sosial membentuk tim pendukung untuk mendukung kelompok penerima PKH yang dipetakan oleh Dinas Sosial, inilah para pendamping yang nantinya akan dilatih untuk menyampaikan tujuan KPM yang sebenarnya, dengan jumlah anggota 21.444 orang, paling banyak tercatat di pusat.⁴

Dari hasil wawancara yang ditemukan di lapangan, konsep PKH merupakan program pengentasan kemiskinan yang menitikberatkan pada tahap awal pembangunan ekonomi masyarakat, memperhatikan kelayakan pendidikan dan relevansinya dengan kesehatan bayi, ibu hamil dan lanjut usia. Diharapkan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat untuk pengembangan ekonomi lokal.

Fasilitator PKH dikuduskan dalam program ini dan diikuti oleh 76 fasilitator. Ini adalah tempat di mana para asisten dibagi menjadi kelompok-kelompok yang tersebar sehingga Anda dapat bersosialisasi. Kabupaten Kudus beranggotakan 21.444 orang dan terbagi dalam beberapa kelompok setelah mendapat data dari pusat. Kelompok-kelompok ini dipetakan oleh bagian kesejahteraan sosial Kabupaten Kudus, khususnya PKH.

”Setiap kelompok terdiri dari 25 sampai 30 anggota dan setiap pelatih bertugas memimpin 12 kelompok. Kelompok-kelompok yang kami petakan mengikuti RT/RW per kota, jadi tidak ada yang terlalu jauh ketika kami mengadakan pertemuan nanti. Jika desa terasa

⁴Habib Maulana, penulis wawancara. 13 Februari 2023, wawancara 3, transkrip.

berbeda dan jauh, saya khawatir akan malas dan tidak ikut dalam kegiatan ini.”⁵

Dalam keterangannya, penyaluran yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kudus, khususnya PKH, memperhatikan beberapa hal dan secara tidak langsung menghambat pelaksanaan PKH yang harus terus diikuti oleh anggota terdaftar. Dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti agar tujuan nyata pengentasan kemiskinan PKH dapat terlaksana dengan optimal.

Tingkat pendidikan seseorang yang rendah dan kesehatan yang buruk akan mempengaruhi cara berpikir yang ada. Orang yang merasa tidak mampu akan memiliki etos kerja dan semangat hidup yang lebih rendah. Jika menurut Anda terkesan rumit, Anda tidak memiliki antusiasme atau minat terhadap apa yang ditawarkan pemerintah. Pertimbangan untuk membagi kelompok menjadi anggota PKH.

“Pendamping terpilih akan diberi petunjuk lebih lanjut bagaimana menyampaikan informasi yang mereka butuhkan untuk disampaikan kepada anggota PKH dengan bahasa yang paling lucu dan sederhana. Dan kami menyampaikan data tersebut dengan *ice breaking* diselingi agar data yang kami terima nantinya dapat diingit dengan baik.”⁶

Seperti yang dikomunikasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus khususnya PKH, para pendamping yang akan bertugas akan memastikan bahwa mereka dibekali dengan materi yang layak mereka terima. Karena kontestan berasal dari latar belakang yang cacat dalam hal pengetahuan dan pemahaman, maka pihak pendamping harus benar-benar memahami cara penyampaian yang benar agar tujuan PKH dapat relevan.

Selain itu, kami melakukan wawancara dengan pendamping PKH kota yang menjelaskan pelaksanaan PKH sebagai berikut:

“Pelaksanaan PKH khususnya di bidang pendidikan adalah untuk memenuhi amanat undang-undang yang dicanangkan pemerintah bahwa wajib belajar 12 tahun tanpa terkecuali, khususnya di bidang kesehatan bagi bayi dan anak balita serta ibu hamil. mengekang angka pendidikan yang rendah dan kesehatan yang buruk ini

⁵Habib Maulana, penulis wawancara. 13 Februari 2023 Wawancara 3, Transkrip

⁶Habib Maulana, penulis wawancara. 13 Februari 2023 Wawancara 3, Transkrip

juga akan dilaporkan ke pusat nanti di bidang pendidikan kita akan melihat tingkat kehadiran anak untuk absen sekolah dimana kita sebagai asisten pengajar bisa mendapatkan data dari sekolah sehingga kita bekerja sama dan angka ini adalah 85 % Seharusnya lebih dari ini. Kami akan bekerja sama dengan Posiandu untuk kesehatan bayi dan ibu hamil. Bayi harus mendapat vaksinasi rutin dan ibu hamil harus diberi nutrisi yang baik ."⁷

Fasilitator PKH memberikan kemudahan bagi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kudus khususnya PKH untuk mendapatkan data yang akan dilaporkan ke pusat jika data yang dilaporkan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh sentra catering anggota PKH. , akan diberikan sanksi berupa teguran sampai meninggalkannya anggota PKH tersebut. Pembina pendampingan kepada anggota PKH akan bergantian kegiatan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jika mengingat apa yang dikomunikasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus, khususnya PKH, satu orang pembina memiliki 12 tanggungan, dan setiap kelompok terdiri dari 25-30 anggota PKH. Pelaporan data yang dikumpulkan oleh pendamping akan ditangani oleh pusat secara berkelanjutan karena pemutakhiran data anggota PKH sedang berlangsung. Apakah Anda meremehkan dukungan yang diberikan atau tidak, itu relevan.

“Pendamping kami akan bekerja dengan kelompok yang kegiatannya beragam. Dalam kegiatan yang kami lakukan memberikan pelatihan dengan cara penyampaian yang sangat sederhana, kami akan bermain game to game agar anggota PKH lebih mudah mengingat materi yang disampaikan. Ice breaking dilakukan melalui program ice breaking. Umumnya kegiatan dalam PKH dilakukan di rumah-rumah anggota peserta program ini, dan waktu serta tanggalnya disepakati bersama. Setiap kelompok memiliki tanggal paten untuk melakukan kegiatan rutin tersebut , dan masing-masing Mereka diputar di rumah anggota .⁸

Dalam wawancara dengan salah satu fasilitator PKH, beliau menjelaskan bahwa kegiatan PKH dilakukan secara rutin, termasuk pembinaan bagi anggota PKH. Dengan harapan agar anggota PKH dapat dengan mudah mempraktekkan apa yang

⁷Heni Murdiana, Wawancara Penulis, 13 Februari 2023, Wawancara 3, Transkrip.

⁸Heni Murdiana, Wawancara Penulis, 13 Februari 2023, Wawancara 3, Transkrip.

telah disampaikan, maka kegiatan tersebut kami sampaikan ringkas mungkin agar mudah dipahami. Kegiatan PKH khusus kelompok juga berbeda-beda sesuai kesepakatan bersama. Kegiatan mereka bergiliran di rumah anggota.

Kemudian, informasi tentang pelaksanaan PKH juga diperlukan dari penerima PKH.

“ Saya pikir staf PKH di kota memberi kami informasi yang jelas yang layak kami terima. Informasi ini biasanya dari grup WhatsApp yang disampaikan atau diberikan pada pertemuan peserta PKH. Kejadiannya menyenangkan tetapi saya tidak pergi karena terkadang saya harus menjaga anak-anak. Ya, fokusnya bukan pada orang yang selalu rapat. ”⁹

" Kadang saya pergi. Saya punya anak yang masih balita dan kadang dia meminta saya untuk pilih-pilih. Jadi biarkan saya di rumah saja. Ayahnya melakukan pekerjaan rumah dan tidak yakin kapan dia akan kembali. Kadang sampai larut malam. malam, kegiatan PKH biasanya dilakukan pada sore hari. . . ”¹⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang melakukan wawancara, dapat dikatakan bahwa proses sosialisasi kebijakan PKH Kabupaten Kudus dalam hal komunikasi untuk mengukur tingkat pemahaman anggota yang disampaikan oleh pendamping cukup dapat dipahami, namun Sayangnya, sebagian keluarga penerima PKH masih berada di rumah lebih diutamakan daripada kewajiban masuk

Ungkapan ini dapat dikatakan bahwa prioritas anggota terhadap kegiatan PKH tidak sepenuhnya ada. Ini merupakan upaya implementasi di Dinas Sosial melalui Pengawas, dan pada akhirnya tetap menjadi keputusan anggota PKH untuk terlibat penuh atau tidak dalam kegiatan ini.

b. Latar belakang mengikuti Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat, dan PKH ini memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ada, khususnya bagi ibu hamil dan bayi serta anak-anak di masyarakat yang menempuh pendidikan. Menurut aturan pemerintah bahwa semua warga negara berhak atas kesejahteraan sosial.

⁹Sumardi, wawancara penulis, 2 Februari 2023, wawancara 3, transkrip.

¹⁰Siti Ningrum, Wawancara Penulis, 1 Februari 2023, Wawancara 3, Transkrip

“Peserta PKH yang terdaftar di balai berhak menjalankan tugasnya sebagai peserta PKH. ¹¹Sesuai pedoman PKH bagi anggota PKH bahwa kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dipantau oleh pembina, anggota wajib mengikuti pertemuan P2K2.

Pedoman PKH menjelaskan bahwa pendidikan anak harus wajib selama 12 tahun dan harus memiliki tingkat kehadiran minimal 85%. Dari segi kesehatan, sebaiknya penerima PKH melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bayi dan ibu hamil. Anggota keluarga lain dan orang dewasa yang lebih tua dapat berpartisipasi dalam layanan sosial sesuai kebutuhan. Dalam kegiatan ini diadakan pertemuan rutin antar anggota PKH atau biasa disebut dengan P2K2 (Pemberdayaan Keluarga).

“Seluruh peserta PKH yang terdaftar di pusat dan dikelompokkan sesuai pasang surut akan mengikuti rangkaian kegiatan yang bertujuan mengubah cara pandang masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah akan mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Mereka akan tertinggal dan saya tidak menutup kemungkinan pandangan mereka akan semakin tertinggal oleh mereka yang memiliki pendidikan yang layak dan terjamin kesehatannya.”¹²

Perwakilan dari bidang kesejahteraan sosial Kabupaten Kudus mengatakan bahwa alasan individu mengikuti PKH adalah keterbelakangan pola pikir karena kurangnya pendidikan dan kesehatan yang buruk. Program pemerintah berharap semua aspek pendidikan dan kesehatan dapat dirasakan secara merata.

c. Kegiatan Program Keluarga Harapan

Dengan menjadi anggota PKH, Anda berhak atas dukungan pemerintah dan hak dukungan sosial yang diberikan bersama kelompok distribusi. Dukungan terhadap kegiatan PKH adalah memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Dalam bantuan sosial ini, anggota PKH juga akan menerima program bantuan parlemen di berbagai bidang seperti pangan, ekonomi, dan pendidikan.

“Pelayanan yang diberikan pemerintah di bidang pendidikan memastikan penerima manfaat PKH memiliki akses yang mudah terhadap layanan pendidikan yang akan

¹¹Habib Maulana, penulis wawancara. 13 Februari 2023 Wawancara 3, Transkrip

¹²Habib Maulana, penulis wawancara. 13 Februari 2023 Wawancara 3, Transkrip

mereka terima, terutama untuk balita, ibu hamil dan lansia. Kemudahan akses ini memungkinkan kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terlihat pada kehadiran siswa misalnya, kami akan memantau dari segi laporan yang kami terima, seperti pendidikan, layanan kesehatan Anda dapat melihat kemajuan laporan Portiandu. ”¹³

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kudus khususnya PKH mengungkapkan bahwa segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk menunjang kegiatan yang diberikan nantinya dan pelayanan tersebut terjamin. Program berjalan sebagaimana mestinya. Pihak sekolah, Posiandu dan pihak yang mendukung program ini akan membantu tercapainya program pemerintah. Semua aspek berkorelasi dengan program yang sedang berjalan. Ketentuan ketidakhadiran yang ditentukan harus memiliki rasio 85% atau lebih untuk menunjukkan bahwa siswa bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan yang mereka tempuh.

Keberhasilan program PKH dipengaruhi oleh peran Pemberdayaan Masyarakat Miskin (RTSM) dan mitranya. Pendamping inilah yang bersentuhan langsung dengan peserta PKH karena program pemerintah yang telah dibentuk. Jadi, kesuksesan program ini bisa dikatakan peran penting para sahabat.

“Adanya program PKH ini sangat membantu saya. Dulu saya susah payah membiayai sekolah anak saya, jadi sekarang sebagai anggota PKH, program ini membantu saya. Jadi penghasilan suami saya bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Selain itu selain membantu, mereka juga mengajari saya cara membuat bisnis yang akan meningkatkan pendapatan keluarga saya sebanyak mungkin dalam kegiatan sehari-hari, dan saya bahkan tidak keberatan terlibat dalam kegiatan yang ada karena saya senang. . ”¹⁴

Ungkapan anggota PKH yang merasakan adanya program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Anggota PKH percaya bahwa masa depan anaknya akan berbeda dengan dirinya, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari kemudahan

¹³Habib Maulana, penulis wawancara. 13 Februari 2023 Wawancara 3, Transkrip

¹⁴Siti Ningrum, Wawancara Penulis, 1 Februari 2023, Wawancara 3, Transkrip

pelayanan pendidikan. Pendidikan yang layak harus diberikan kepada anak cucu untuk memutus mata rantai kemiskinan ini.

C. Analisis Penelitian

1. Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus

Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari 17 tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang dilakukan pada PKH meliputi :

a. *No Proverty* (Tanpa Kemiskinan)

Program SDGs yang pertama memiliki kesuaian dengan proses pelaksanaan PKH, dalam program PKH yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan salah satu program unggulan yang dijalankan dengan tujuan pengentasan kemiskinan didalamnya.

b. *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan)

Program SDGs tanpa kelaparan diselaraskan dengan program yang dijalankan oleh Dinas Sosial diantara programnya yaitu PKH dan BNPT. Kedua program tersebut memiliki kesamaan tujuan dari pemerintah yang dimana dalam program tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa tunai maupun non tunai. Jika dalam PKH, bantuan tersebut berupa tunai dan jika di BNPT bantuannya non tunai berupa bahan pokok makanan.

c. *Good Health and Well-Being* (Kesehatan dan sejahtera)

Jaminan atas Kesehatan serta kesejahteraan diwujudkan dengan pelaksanaan program Dinas Sosial dalam program PIP, PISPK dan PKH. Pelaksanaan ketiga program tersebut menjamin atas pendidikan generasi muda, Kesehatan keluarga kurang mampu serta harapan untuk kesejahteraan sebuah keluarga.

Program PIP diwujudkan dalam keringanan biaya sekolah untuk keluarga miskin dan mencegah putus sekolah agar siswa-siswi yang sudah putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya.

Program PISPK yang dijalankan oleh pihak puskesmas menjangkau sasaran masyarakat miskin dengan maksud pelayanan yang akan diberikan tidak hanya berdiam diri namun akan menjangkau keluarga kurang mampu untuk memastikan Kesehatan dan pelayanan yang diberikan sampai kepada mereka.

Program PKH ditujukan kepada keluarga agar mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk memberikan harapan memutus tali kemiskinan mereka.

d. *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas)

Pengaplikasian program dalam bidang pendidikan diwujudkan dalam program PIP yang dimana dalam program tersebut memastikan bahwa generasi di Indonesia mendapatkan wajib belajar 12 tahun dan memberikan kesempatan melanjutkan sekolah bagi mereka yang mengalami putus sekolah. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidika juga disertai bantuan untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sekolah.

e. *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Program SDGs berikutnya yakni pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, program ini berkesinambungan dari program PKH jika peserta PKH dapat mengikuti kegiatan dalam program tersebut. Didalam teknis PKH tujuan mendasar adalah memberikan pengetahuan agar cara berpikir mereka berkembang, selain itu, dalam kegiatannya juga diberikan pendidikan tambahan mengenai cara berkreasi serta berwirausaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Dalam 17 program SDGs yang berkesinambungan oleh Program Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan ada 5, jika diamati Kembali ke 17 program SDGs memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain dan memiliki goals pengentasan kemiskinan. Ke 5 program yang berhubungan dengan pogram SDGs terfokus dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, Kesehatan yang layak, kesejahteraan social. Mewujudkan tujuan tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lain yang menjadikan pelaksanaannya terdapat keterikatan.

2. Kesesuaian teori dengan pelaksanaan yang dilapangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rencana, keputusan, dan lain-lain. Eksekusi adalah tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang disusun secara matang dan terperinci, dan penerapan setelah perencanaan dianggap matang. Menurut GR Terry (Sukarna 2010: 3), implementasi meliputi kegiatan pengambilan keputusan, pengelompokan, pencapaian tujuan, dan penugasan orang-orang tertentu sesuai dengan amanat yang diberikan kepada mereka untuk melaksanakan tujuan tersebut.

Majone dan Wildasky (Nurdin Usman 2002:70) berpendapat bahwa implementasi adalah evaluasi. Ini menyatakan kembali bahwa implementasi adalah perpanjangan dari semua kegiatan yang saling berkoordinasi.¹⁵

Menurut teori yang dikemukakan oleh GR Terry, proses implementasi Program Keluarga Harapan berkisar pada penentuan program mana, yaitu pengentasan kemiskinan, yang akan ditargetkan sesuai dengan program dunia SDGs, dan kemudian mendokumentasikan siapa yang berhak . dukungan PKH. Data tersebut kemudian diberikan ke dinas sosial di masing-masing daerah, yang mengelompokkan data penerima untuk memudahkan pelaksanaan program. Pengelompokan ini dikoordinasikan dengan pembagian RT/RW anggota tersebut untuk memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan tersebut. Semoga kemudahan-kemudahan ini dapat mempermudah pelaksanaan PKH Anda dan mencapai tujuan Anda. Sejak saat itu, kami melakukan pemantauan secara berkala, seperti pengecekan data anak-anak yang menerima pendidikan, dengan keinginan untuk menerima pendidikan dengan sungguh-sungguh. Angka yang ditentukan adalah 85% atau lebih, yang juga berlaku untuk perkembangan kesehatan bayi, ibu hamil dan lanjut usia yang ingin memastikan bahwa perkembangan keturunannya di masa depan akan berkembang seperti yang diharapkan.

Menurut William J (1978), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan berdasarkan apa yang perlu dicapai dan bagaimana mencapainya dalam situasi tertentu, di mana beberapa aktor politik atau pemerintah berada di bawah lingkup mereka. Dalam definisi ini, kebijakan publik melibatkan sejumlah keputusan dan didukung oleh tujuan dan metode untuk mencapai tujuan tersebut, dan kebijakan publik dibuat karena merespon masalah yang muncul dalam konteks tertentu. Pengertian tersebut menegaskan bahwa pembentukan kebijakan ini didasari untuk menjawab permasalahan sosial yang ada saat ini, namun tidak semua permasalahan sosial dijadikan kebijakan publik. Isu-isu sosial yang memiliki urgensi tinggi dan menyentuh kepentingan banyak orang memberdayakan para aktor politik untuk merumuskan kebijakan publik secepat mungkin.

¹⁵Hafidhuddin Didin dkk, *Praktek Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2008), https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_syariah_dalam_practice/PRFfhYdzyawC?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+pelaksanaan+menurut+kbbi&printsec=sampul depan

Secara teori, kata William J, keputusan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai memerlukan cara untuk mencapainya. Dalam program PKH, ini merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan program SDGs yang mencakup pengentasan kemiskinan. Dalam kebijakan publik yang melaksanakan PKH, dinas sosial merupakan aktor publik yang ikut serta dalam pelaksanaan PKH. Pelaksanaan Keputusan Mengakhiri Kemiskinan didukung oleh tujuan pelaksanaan program SDGs, yang meliputi cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan pelaksanaan program PKH di setiap daerah.

Kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan miskin atau keadaan miskin dimana keadaan penduduk hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan taraf hidup minimum¹⁶. Kemiskinan sendiri merupakan suatu taraf hidup yang rendah atau ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi taraf hidup yang ada dalam suatu masyarakat. Kebutuhan ini ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan selain kebutuhan dasar. Hal ini mempengaruhi ketidakmampuan individu untuk memenuhi standar hidup dalam hal kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya.

Anggota PKH dan komunitas terkait berasal dari latar belakang miskin. Semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan terpenuhi, namun tidak secara maksimal. Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, kebutuhan sekunder dan tersier lainnya bukanlah tujuan hidup mereka. Oleh karena itu, tuntutan pendidikan dan kesehatan tidak dapat diperoleh secara maksimal oleh anggota PKH. Melalui program ini, pemerintah memberikan kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya.

Program SDGs merupakan perpanjangan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2005. Kedua program berbeda dalam konten dan persiapan. Sasaran MDGs adalah membagi dua setiap masalah pembangunan yang dinyatakan dalam tujuan dan sasaran. Dilakukan lebih dari 15 tahun yang lalu, program MDGs meliputi 8 target, 21 target dan 60 indikator. Angka ini jauh dari program SDGs yang telah

¹⁶Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Ponorogo: UNIDA GONTOR Press, 2018) https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Pemdingan_Islam/9_A3EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kemiskinan+menurut+kbbi&pg=PA199&printsec=frontcover

disepakati karena program SDGs merupakan kelanjutan dan pelengkap dari program MDGs.¹⁷

Sasaran program SDGs terdiri dari 8 tujuan, 21 tujuan dan 60 indikator, dan dalam pembahasan ini terdapat program seperti tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan dan pendidikan berkualitas. Pelaksanaan program PKH juga akan dilanjutkan dengan pendampingan teknis agar faktor kemiskinan yang mempengaruhi kebutuhan pangan dan kurangnya pendidikan dapat terpenuhi secara memadai. Mereka yang membutuhkan akan mendapat manfaat dari kemudahan layanan yang disediakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program ini adalah adanya pemantauan secara berkala untuk memastikan langkah-langkah pencapaian tujuan tersebut dapat dengan mudah direalisasikan. Pihak ketiga yang membantu memfasilitasi layanan yang disediakan pemerintah juga bekerja sama dengan penyediaan data anggota PKH untuk memastikan langkah-langkah untuk mencapai program dengan sukses. Diharapkan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mendukung pelaksanaan program SDGs dapat menciptakan masa depan generasi penerus yang berkualitas.

¹⁷Pramujo Bambang dkk, Mangrove for SDGs (Bogor: PT Publisher IPB Press, 2021) https://www.google.co.id/books/edition/Mangrove_Untuk_SDGs/tHtfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sdgs&pg=PA87&printsec=frontcover